

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksi sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibanding pada tahun lalu yang sebanyak 275,7 juta jiwa. Peledakan penduduk tentu membawa tantangan dalam meningkat kesejahteraan masyarakat, mencipta lapangan kerja, mengatakansi masalah kemiskinan, meningkat mutu pendidikan dan kesehatan, meningkat infrastruktur, dan pelayanan publik. Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan bangsa dan ini tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Apabila lajunya pertumbuhan penduduk tinggi, maka dituntut kualitas hidup atau kemakmuran semakin tinggi. Pemerintah mengatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, dan jarak usia ideal melahir, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dan ayat 9 yang berbunyi “Penyelenggara program keluarga berencana adalah proses, cara dan tindakankan untuk melaksanakan program keluarga berencana oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan tersebut dapat menekan laju pertumbuhan, agar pembangunan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terwujud dengan cepat, maka perlu dilakukan pengendalian penduduk secara bijaksana melalui program Keluarga Berencana.

Gerakan Keluarga Berencana ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mampu menurunkan tingkat kelahiran secara lebih cepat lagi. Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk membentuk keluarga kecil bahagia dengan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Untuk tujuan tersebut pemerintah perlu mengintervensi dalam mengatur kelahiran tetapi tidak mengurangi hak seseorang sesuai dengan tujuan Program KB secara umum membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data terbaru Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih relatif rendah dibandingkan metode non-MKJP. MKJP yang meliputi IUD, implan, MOW, dan MOP belum menjadi pilihan utama masyarakat, meskipun metode ini lebih efektif dalam jangka panjang.

Di Desa Tungkup memiliki jumlah penduduk mencapai 1001 jiwa, yang dimana dari jumlah tersebut yang menggunakan KB Implan 4 Orang, KB Kondom 8 Orang, KB IUD tidak ada. kebanyakan dari mereka menggunakan KB Suntik dan KB Pil. Yang menggunakan KB Suntik ada 52 Orang, KB Pil

102 Orang. Adapun data beberapa desa yang masih aktif menggunakan KB seperti di tabel berikut:

**Tabel 1.1 Data Jumlah Peserta KB Aktif  
Tahun 2026**

*(Sumber: Rekap Data Penggunaan KB Kecamatan Labuan Amas Utara Tahun 2026)*

| KELURAHAN        | JUMLAH PESERTA KB AKTIF | METODE KONTRASEPSI MODERN |     |        |        |     |           |           |     |       |
|------------------|-------------------------|---------------------------|-----|--------|--------|-----|-----------|-----------|-----|-------|
|                  |                         | SUNTIK                    | PIL | KONDOM | IMPLAN | IUD | VASEKTOMI | TUBEKTOMI | MAL | TOTAL |
| KASARANGAN       | 215                     | 80                        | 116 | 7      | 9      | 1   | 0         | 2         | 0   | 215   |
| BANUA KUPANG     | 274                     | 107                       | 148 | 3      | 13     | 2   | 0         | 1         | 0   | 274   |
| RANTAU KEMINTING | 212                     | 97                        | 95  | 2      | 8      | 0   | 0         | 7         | 1   | 210   |
| BINJAI PEMANGKIH | 215                     | 61                        | 137 | 7      | 7      | 3   | 0         | 0         | 0   | 215   |
| SAMHURANG        | 255                     | 99                        | 142 | 4      | 9      | 0   | 0         | 0         | 0   | 254   |
| PAHALATAN        | 127                     | 32                        | 78  | 1      | 15     | 1   | 0         | 0         | 0   | 127   |
| SUNGAI BULUH     | 453                     | 233                       | 202 | 8      | 8      | 0   | 0         | 2         | 0   | 453   |
| KADUNDUNG        | 174                     | 57                        | 95  | 3      | 18     | 1   | 0         | 0         | 0   | 174   |
| TUNGKUP          | 166                     | 52                        | 102 | 8      | 4      | 0   | 0         | 0         | 0   | 166   |
| TABAT            | 203                     | 76                        | 111 | 2      | 13     | 0   | 0         | 1         | 0   | 203   |
| RANTAU BUJUR     | 262                     | 167                       | 84  | 4      | 5      | 0   | 0         | 1         | 0   | 261   |
| BINJAI PIRUA     | 384                     | 143                       | 225 | 9      | 6      | 1   | 0         | 0         | 0   | 384   |

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Tungkup ada 166 Orang.

Namun, implementasi MKJP masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya pengetahuan masyarakat, akses pelayanan kesehatan, serta faktor sosial budaya yang mempengaruhi minat penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi program yang tepat agar masyarakat dapat memahami manfaat MKJP dan bersedia menggunakannya secara berkelanjutan.

Implementasi program MKJP di desa tersebut menjadi penting mengingat masih terdapat pasangan usia subur yang belum memanfaatkan metode kontrasepsi jangka panjang secara optimal. Kondisi ini dapat

dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat, akses pelayanan kesehatan, serta faktor sosial budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut, implementasi program KB metode kontrasepsi jangka panjang di Desa Tungkup perlu dikaji lebih lanjut guna mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan MKJP. Dengan adanya implementasi program yang optimal, diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas kesehatan keluarga serta kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dari hasil pengamatan Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ini terdapat beberapa fenomena masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi pasangan usia subur untuk ikut menggunakan KB MKJP seperti Implan, IUD, Metode Operasi Wanita, dan Metode Operasi Pria karena takut, sakit dan merusak kesehatan yang menurut mereka harus dioperasi dan alat yang akan dimasukkan kedalam rahim maupun kuit. Jadi kebanyakan pasangan usia subur menggunakan Non-MKJP yaitu kondom, pil, dan suntik karena menganggap KB tersebut lebih aman. *(Sumber: Rekap Data Penggunaan KB Kecamatan Labuan Amas Utara Tahun 2026).*
2. Kurangnya pemahaman dan munculnya mitos tentang MKJP masih ditemukan pemahaman yang kurang tepat dikalangan masyarakat mengenai MKJP kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan komunikasi informasi program KB belum sepenuhnya efektif dan merata
3. Keterbatasan sarana dan dukungan pelayanan kesehatan pelaksanaan program KB MKJP ini juga memiliki kendala dari sisi pelayanan, seperti

keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, fasilitas pelayanan serta jadwal pelayanan yang belum optimal

Berdasarkan fenomena masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini dapat mengarah kedalam pokok permasalahan yang akan di teliti, maka peneliti ,menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Leo Agustino, 2022) mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*)
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan penulis, maka dalam hal ini yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Desa Tungkup Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian Ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait Implementasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Desa Tungkup dan Balai KB Kecamatan Labuan Amas Utara dalam upaya memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang sebagai upaya pengendalian kelahiran yang efektif dan aman. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu mengurangi kesalah pahaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai.

